

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
CAPAIAN KINERJA  
PROGRAM DAN KEGIATAN  
TRIWULAN II TAHUN 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**TAHUN 2020**

## Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Monev Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan I Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2020.

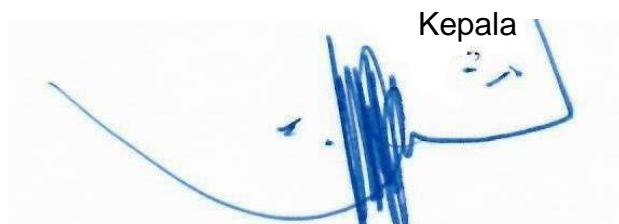
Laporan Monev Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan I ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Bantul, 1 Juli 2020

Kepala



**Drs. Isdarmoko, M. Pd., M.MPar.**  
**NIP. 196407271993031003**

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	viii
Bab I Pendahuluan .....	2
A. Latar Belakang .....	2
B. Pembentukan OPD... .....	3
C. Susunan Organisasi .....	4
D. Keragaman SDM.....	5
E. Isu Strategis .....	6
Bab II Perencanaan Kinerja.....	8
A. Rencana Strategis .....	8
1. Visi dan Misi.....	8
2. Tujuan dan Sasaran.....	9
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	11
C. Program untuk Pencapaian Sasaran .....	20
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	21
Capaian Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2020.....	22
Bab IV Penutup .....	49

# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul memiliki kewajiban dan komitmen untuk menyampaikan capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan yang pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja, yang diwujudkan dalam Laporan Monev Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2020

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Laporan kinerja merupakan suatu laporan yang memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Tujuan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amanat. Dengan demikian laporan kinerja merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut.

## B. Pembentukan OPD

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Kabupaten Bantul.

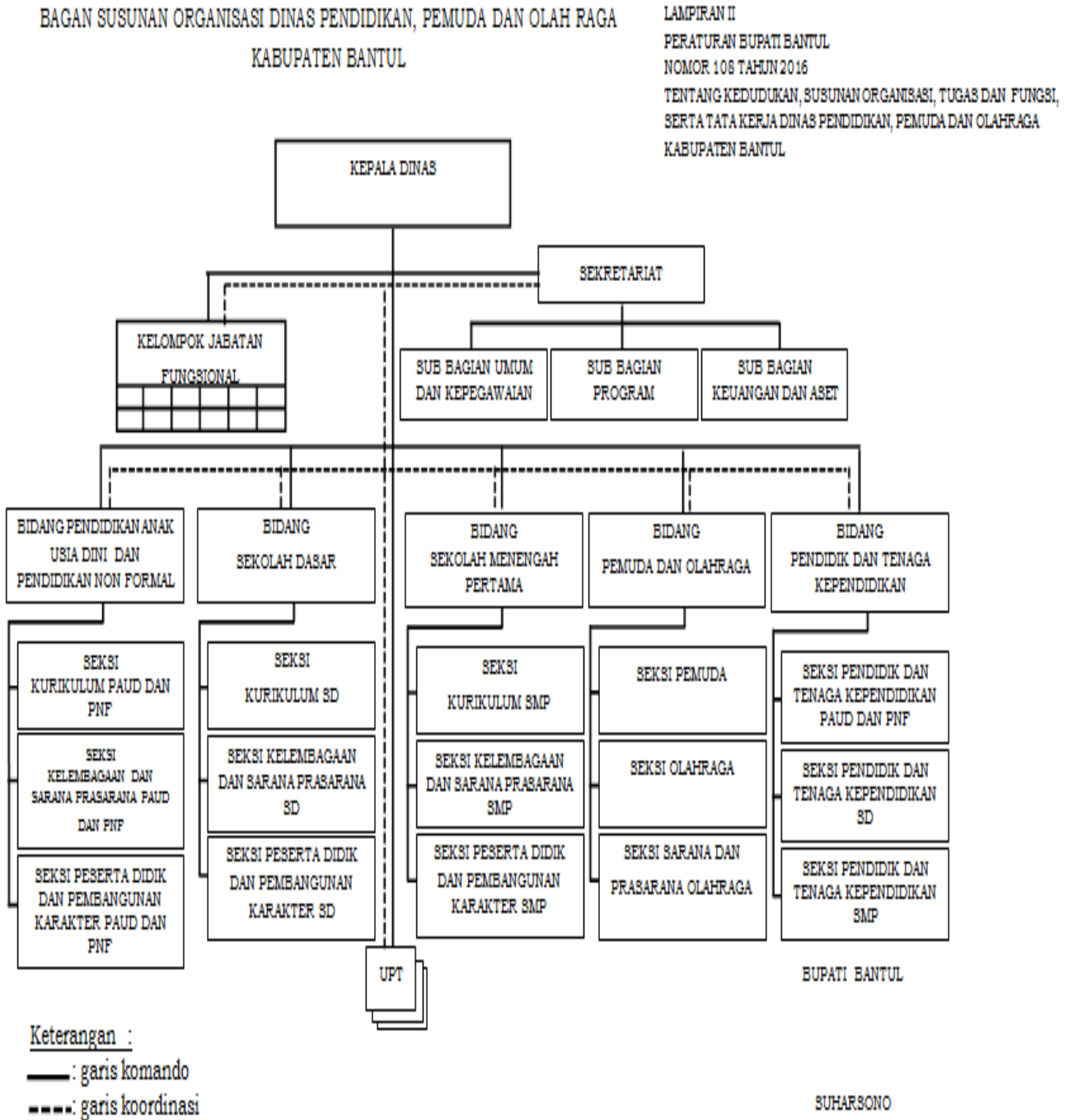
Dari sebuah siklus manajemen pemerintahan maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Sedangkan tugas pokok yang diamanatkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bantul sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, serta kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, serta kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, serta kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan kesekretariatan Disdikpora; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :

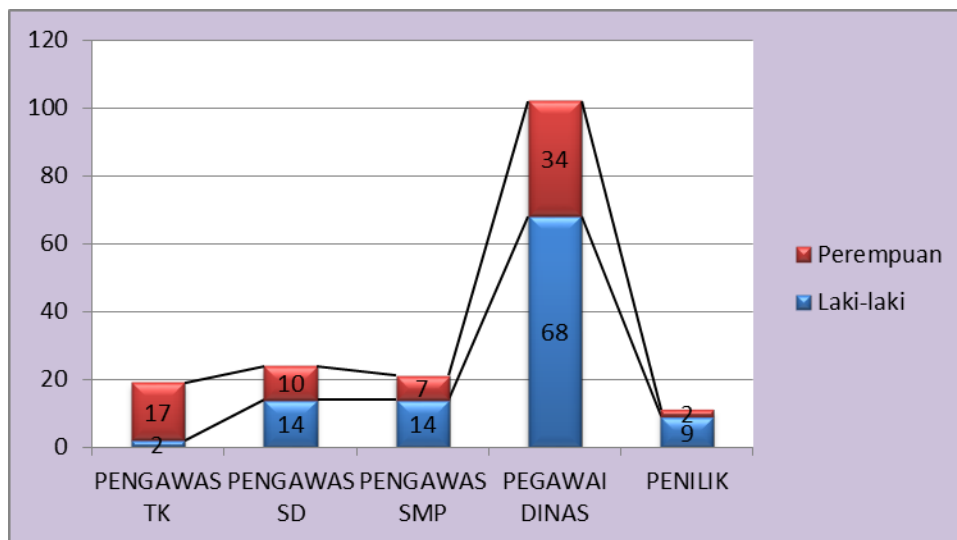


Sumber : Dikpora, 2019

**Gambar I.1 Struktur Organisasi Dikpora**

## D. Keragaman SDM

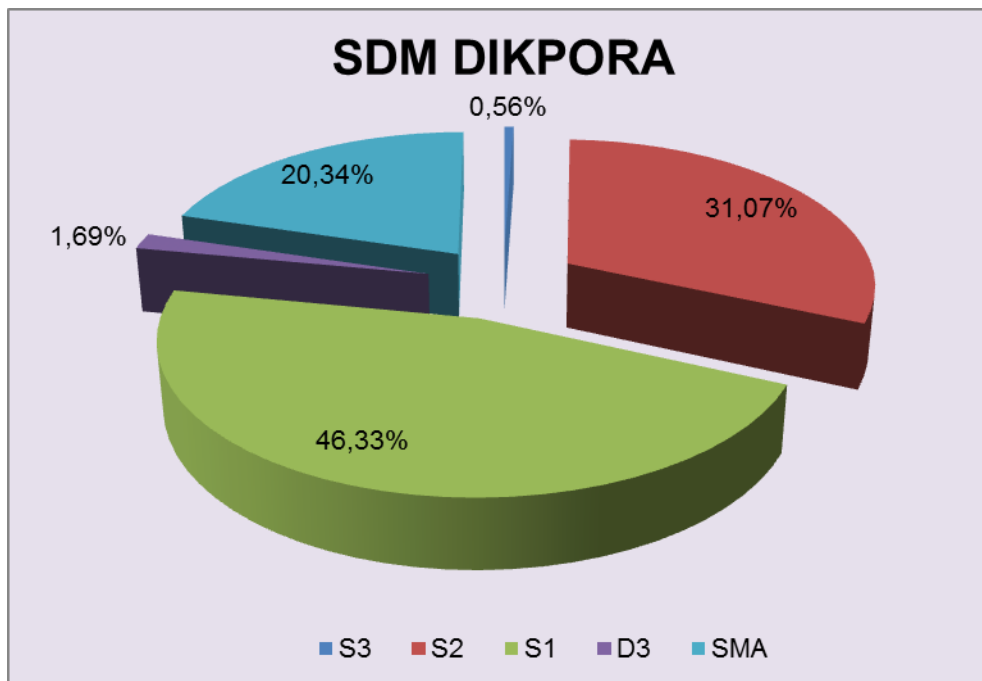
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2019 sebanyak 177 orang, terdiri dari 75 orang pengawas penilik dan 102 orang pegawai fungsional di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Dari semua 177 pegawai tersebut terdiri, 107 pegawai atau 60,45 % laki-laki dan 70 pegawai atau 39,55 % perempuan, hal ini menunjukkan perimbangan gender yang baik.



Sumber : Dikpora, 2019

**Gambar I.2 SDM Dikpora Menurut Gender**

Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 46,33% atau 82 orang, disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 25,32% atau 40 orang, kemudian jenjang pendidikan SMA sebanyak 31,07% atau 55 orang dan jenjang pendidikan S3 sebanyak 0,63% atau 1(satu) orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga cukup baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dikpora, 2019

**Gambar I.3 SDM Dikpora Menurut Pendidikan**

## E. Isu Strategis

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Bantul dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Bantul. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul 2016-2021 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Bantul 2016-2021.

Di dalam upaya mengidentifikasi secara sistematis berbagai faktor untuk merumuskan strategi kebijakan pada Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul, yaitu dengan menggunakan model analisis situasi SWOT (strength, weaknesses, opportunities, and threat).



Memperhatikan hasil dari analisis SWOT serta berdasarkan pada visi dan misi yang diemban sebagai kriteria, maka dihasilkan asumsi pilihan strategis sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pendidik dan tenaga kependidikan serta stakeholder untuk perbaikan mutu
2. Melakukan percepatan peningkatan mutu
3. Meningkatkan koordinasi untuk meningkatkan mutu
4. Penataan ulang pegawai untuk peningkatan mutu pendidikan
5. Mengoptimalkan peran komite sekolah untuk pencapaian visi
6. Mengoptimalkan kinerja untuk peningkatan pelayanan
7. Mengoptimalkan peran masyarakat dan mendorong kinerja pegawai
8. Meningkatkan peran masyarakat untuk pembentukan jaringan kerjasama /kordinasi
9. Pembentukan jaringan kerjasama lintas sektoral
10. Melaksanakan pendidikan karakter untuk semua siswa
11. Mengantisipasi merebaknya penyakit masyarakat

## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

#### 1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.***

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu **"Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur "** dan misi ke-5 yaitu **"Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa"**.

## 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sub bab ini menjelaskan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan sasaran daerah.

**Tabel II.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Visi :					
Misi	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang memiliki akhlak mulia, kecerdasan, keunggulan, dan kemandirian	Meningkatnya kualitas sikap dan mental peserta didik	Angka Putus Sekolah SD/MI
					Angka Putus Sekolah SMP/MTs
			Terwujudnya Budaya Mutu Pendidikan Dasar	Meningkatnya kualitas Peserta Didik	Persentase Kelulusan SD/ MI
					Persentase Kelulusan SMP/ MTs
					Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI
					Peringkat rata-rata nilai USM SMP/MTs
					Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional
					APK SD/MI
			Terwujudkan tata kelola pendidikan yang efektif,efisien, transparan serta memiliki akuntabilitas yang tinggi pada setiap penyelenggara pendidikan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan dasar	APK SMP/MTs
					APM SD/MI
APM SMP/MTs					
Angka Melanjutkan SD/MI					
					Angka Melanjutkan SMP/MTs
					Angka Rata-Rata Lama

Visi :					
Misi	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
					Sekolah
			Terwujudnya Pendidikan PAUD yang berkualitas dan berkarakter	Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini	APK PAUD
	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya kualitas dan kuantitas olahraga	Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti	Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga
Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya kualitas kepemudaan	Jumlah Pemuda Pelopor

### 3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II.2**  
**Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga**

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur</b>			
<b>Terwujudnya pendidikan berkualitas yang memiliki akhlak mulia, kecerdasan, keunggulan, dan kemandirian</b>	Meningkatnya kualitas sikap dan mental peserta didik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan pendidik dan tenaga kependidikan serta stakeholder untuk perbaikan mutu</li> <li>2. Penerapan pendidikan budaya, akhlak mulia dan karakter bangsa</li> <li>3. Melaksanakan pendidikan karakter untuk semua siswa</li> <li>4. Peningkatan perat serta Komite sekolah untuk peningkatan Kapasitas Pendidik baik PNS maupun tenaga kontrak</li> </ol>	Implementasi dari misi pertama, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bidang pendidikan yang handal, berakhlak mulia dan profesional, bahwa peran Dinas Pendidikan Dasar selain memberikan pelayanan kepada masyarakat juga memfasilitas terciptanya peran serta masyarakat pada kepedulian pendidikan.
<b>Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur</b>			
<b>Terwujudnya Budaya Mutu Pendidikan Dasar</b>	Meningkatnya kualitas Peserta Didik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan mutu lulusan pendidikan yang memiliki kemampuan kognitif, efektif dan psikomotorik secara seimbang;</li> <li>2. Memperkaya materi pelajaran melalui pengembangan kurikulum;</li> <li>3. Melaksanakan pendidikan karakter untuk semua siswa</li> </ol>	Implementasi dari misi kedua, meningkatkan kualitas lulusan siswa yang memiliki daya saing tinggi, bahwa diharapkan kualitas lulusan atau mutu lulusan dapat bersaing dengan lulusan di luar Kabupaten Bantul bahkan Luar Daerah Istimewa Yogyakarta
<b>Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur</b>			
<b>Terwujudkan tata kelola pendidikan yang efektif,efisien, transparan serta memiliki akuntabilitas yang tinggi pada setiap penyelenggara pendidikan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan</b>	Meningkatnya kualitas pendidikan dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan sistem pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan</li> <li>2. Meningkatkan kemampuan manajemen pada satuan pendidikan</li> <li>3. Penyediaan sarana prasarana yang bermutu dan merata</li> </ol>	Implementasi dari misi ketiga, memberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam mewujudkan lembaga pendidikan formal yang efektif, serta memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan akuntabel, dengan pemberdayaan masyarakat diharapkan peran serta aktif masyarakat dalam kemajuan dunia pendidikan dengan memaksimalkan peran Dewan Pendidikan Kabupaten dan Dewan Sekolah secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan ke publik
<b>Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur</b>			

<b>Terwujudnya Pendidikan PAUD yang berkualitas dan berkarakter</b>	Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan pendidikan informal</li> <li>2. Penerapan pendidikan budaya, akhlak mulia dan karakter bangsa</li> <li>3. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkompeten</li> <li>4. Penyediaan sarana prasarana yang bermutu dan merata</li> </ol>	Misi keempat dengan memelihara, mengembangkan, dan melestarikan seni dan budaya yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia, dapat diimplementasikan dalam perilaku dan budaya yang harus dimiliki kepada anak didik karena Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan sekaligus kota budaya memiliki karakteristik yang mencerminkan kekayaan akan Budaya di Indonesia, yang harus tertanamkan, terpelihara, dan dapat dilestarikan oleh generasi mendatang
<b>Misi 5 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa</b>			
<b>Meningkatkan kualitas dan kepemudaan dan olahraga</b>	Meningkatnya kualitas dan kuantitas olahraga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perluasan akses kepemudaan</li> <li>2. Peningkatan jumlah cabang olahraga yang aktif berkompetisi</li> <li>3. Peningkatan kerjasama bidang kepemudaan dan keolahragaan</li> <li>4. Peningkatan sarpras kepemudaan dan olahraga</li> </ol>	Mendorong dan meningkatkan kecakapan/life skill pemuda serta pembinaan dan dukungan terhadap olahraga prestasi
	Meningkatnya kualitas kepemudaan		Meningkatkan jumlah kegiatan yang melibatkan generasi muda.
			Meningkatkan jumlah pembangunan sarpras kepemudaan dan jumlah pembangunan sarpras olahraga

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Program Pendidikan Anak Usia Dini
6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
7. Program Pendidikan Non Formal
8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
10. Program Peningkatan Nilai Akademik
11. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
12. Program peningkatan peran serta kepemudaan
13. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
14. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
15. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :



**Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas sikap dan mental peserta didik	Angka Putus Sekolah SD/MI
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs
2	Meningkatnya kualitas Peserta Didik	Persentase Kelulusan SD/ MI
		Persentase Kelulusan SMP/ MTs
		Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI
		Peringkat rata-rata nilai USM SMP/MTs
		Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional
3	Meningkatnya kualitas pendidikan dasar	APK SD/MI
		APK SMP/MTs
		APM SD/MI
		APM SMP/MTs
		Angka Melanjutkan SD/MI
		Angka Melanjutkan SMP/MTs
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah
4	Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini	APK PAUD
5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas olahraga	Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti
6	Meningkatnya kualitas kepemudaan	Jumlah Pemuda Pelopor

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

## B. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut :

**Tabel II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas sikap dan mental peserta didik	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
		Program Pendidikan Menengah
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2.	Meningkatnya kualitas Peserta Didik	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3.	Meningkatnya kualitas pendidikan dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.	Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini
		Program Pendidikan Non Formal
5.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas olahraga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
6.	Meningkatnya kualitas kepemudaan	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
		Program peningkatan peran serta kepemudaan
		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

## Capaian Program dan Kegiatan Trwiulan II Tahun 2020

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Triwulan II Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Pagu	Fisik (Rata-Rata)			Fisik (Pembobotan)				Keuangan				
		Target	Realisasi	Deviasi	Bobot	Bobot Target	Bobot Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>													
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	2.695.586.560	78.1	60	18.1	0.023	1.796	1.38	0.416	2.096.448.100	77.773	1.379.809.068	51.188	26.585
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	452.900.000	69.4	40	29.4	0.004	0.278	0.16	0.118	277.294.000	61.226	72.192.572	15.94	45.286
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.423.131.000	51	50	1	0.012	0.612	0.6	0.012	716.631.000	50.356	588.400.040	41.345	9.011
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>													
Pengadaan barang bercorak kesenian	162.950.000	100	100	0	0.001	0.1	0.1	0	162.950.000	100	159.995.000	98.187	1.813
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	175.000.000	100	65	35	0.001	0.1	0.065	0.035	175.000.000	100	94.111.000	53.778	46.222
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	325.050.000	99	95	4	0.003	0.297	0.285	0.012	317.050.000	97.539	303.980.000	93.518	4.021
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	180.000.000	64	55	9	0.002	0.128	0.11	0.018	113.752.000	63.196	69.607.000	38.671	24.525
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	472.270.000	54	45	9	0.004	0.216	0.18	0.036	254.535.000	53.896	136.044.032	28.806	25.09
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>													

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	460.577.000	73.5	55	18.5	0.004	0.294	0.22	0.074	324.212.000	70.393	212.804.500	46.204	24.189
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>													
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	192.950.000	44	40	4	0.002	0.088	0.08	0.008	71.550.000	37.082	71.550.000	37.082	0
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	47.125.000	35	10	25	0	0	0	0	11.350.000	24.085	1.750.000	3.714	20.371
<b>Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda</b>													
Pengembangan potensi pemuda	366.070.000	73	73	0	0.003	0.219	0.219	0	234.650.000	64.1	227.675.000	62.194	1.906
<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>													
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	81.480.000	99	46	53	0.001	0.099	0.046	0.053	80.155.000	98.374	30.615.000	37.574	60.8
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	186.512.000	56	10	46	0.002	0.112	0.02	0.092	102.000.000	54.688	4.550.000	2.44	52.248

Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD	1.450.881.000	26	26	0	0.012	0.312	0.312	0	285.769.000	19.696	283.749.000	19.557	0.139
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	550.100.000	57	53	4	0.005	0.285	0.265	0.02	276.500.000	50.264	246.550.000	44.819	5.445
<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>													
Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP	16.526.650.000	53	53	0	0.138	7.314	7.314	0	8.527.850.000	51.601	8.345.900.000	50.5	1.101
Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar	36.000.000	100	100	0	0	0	0	0	36.000.000	100	36.000.000	100	0
Perijinan SD dan SMP Baru	2.000.000	100	5	95	0	0	0	0	2.000.000	100	0	0	100
Pengembangan Pendidikan Dasar SMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengembangan kompetensi siswa pendidikan dasar	149.952.500	69	35	34	0.001	0.069	0.035	0.034	89.552.500	59.721	43.750.000	29.176	30.545
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD	49.625.000	100	98	2	0	0	0	0	49.625.000	100	48.400.000	97.531	2.469
Pengembangan pendidikan dasar berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal	83.620.000	0	0	0	0.001	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Pendidikan Dasar SD	264.600.000	100	95	5	0.002	0.2	0.19	0.01	264.600.000	100	245.400.000	92.744	7.256
Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD	86.550.000	73.2	45	28.2	0.001	0.073	0.045	0.028	61.950.000	71.577	24.299.000	28.075	43.502
Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD	4.592.648.000	36	35	1	0.038	1.368	1.33	0.038	1.121.100.000	24.411	1.085.150.000	23.628	0.783
Pengembangan kompetensi siswa pendidikan SD	398.798.630	100	95	5	0.003	0.3	0.285	0.015	397.998.630	99.799	363.601.383	91.174	8.625
Penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI	30.739.975.000	50	52	-2	0.258	12.9	13.416	-0.516	15.888.775.000	51.688	15.697.745.000	51.066	0.622
Monitoring, evaluasi dan pelaporan siswa	73.125.000	43	25	18	0.001	0.043	0.025	0.018	31.250.000	42.735	9.375.000	12.821	29.914
Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP	67.150.000	58	50	8	0.001	0.058	0.05	0.008	27.900.000	41.549	29.100.000	43.336	-1.787
Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	2.666.347.000	45	36	9	0.022	0.99	0.792	0.198	655.550.000	24.586	624.150.000	23.408	1.178
Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan BOS	10.625.000	36	15	21	0	0	0	0	625	5.882	625	5.882	0

<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>													
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	36.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan peranserta pemuda	787.170.470	18	15	3	0.007	0.126	0.105	0.021	84.185.000	10.695	78.270.000	9.943	0.752
<b>Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</b>													
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	59.280.000	100	100	0	0	0	0	0	59.280.000	100	59.280.000	100	0
<b>Program Pendidikan Non Formal</b>													
Penyelenggaraan pendidikan non formal	968.230.000	50	45	5	0.008	0.4	0.36	0.04	479.335.000	49.506	312.560.000	32.282	17.224
Pengembangan Pendidikan non formal	210.344.000	59	25	34	0.002	0.118	0.05	0.068	113.716.000	54.062	22.604.000	10.746	43.316
Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B	52.032.500	60	40	20	0	0	0	0	29.200.000	56.119	14.400.000	27.675	28.444
Penyelenggaraan Paket C setara SMU	37.640.500	46.3	41	5.3	0	0	0	0	13.900.000	36.928	12.850.000	34.139	2.789



<b>Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga</b>													
Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	59.043.000	50	10	40	0	0	0	0	29.521.500	50	0	0	50
<b>Program Pembinaan dan Masyarakat Olah Raga</b>													
Pengembangan olahraga rekreasi	294.697.800	60.6	45	15.6	0.002	0.121	0.09	0.031	162.057.800	54.991	84.587.800	28.703	26.288
Pembinaan dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga	1.857.162.515	94	70	24	0.016	1.504	1.12	0.384	1.692.537.515	91.136	1.101.786.000	59.326	31.81
<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>													
Evaluasi standar pelayanan minimal	37.841.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	48.967.340.000	27	27	0	0.41	11.07	11.07	0	12.703.110.000	25.942	11.916.550.000	24.336	1.606
Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	82.200.000	83	75	8	0.001	0.083	0.075	0.008	66.400.000	80.779	52.325.000	63.656	17.123
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga</b>													
Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga	642.430.780	85	80	5	0.005	0.425	0.4	0.025	536.999.005	83.589	478.737.750	74.52	9.069
<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>													

Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru (PPDB)	242.575.000	100	15	85	0.002	0.2	0.03	0.17	242.575.000	100	0	0	100
Pembinaan dan operasional dewan pendidikan	37.900.000	100	15	85	0	0	0	0	37.900.000	100	600	1.583	98.417
Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi	23.000.000	94	5	89	0	0	0	0	21.250.000	92.391	0	0	92.391
<b>Program Peningkatan Nilai Akademik</b>													
Peningkatan Metode Pengajaran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119,365,261,255	60.178	42.549			42.298	40.824		48,926,589,050	40.989	44,571,428,145	37.34	

Sumber : Dikpora, TW 2 2020

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.